

ANALISIS LAPORAN KEUANGAN DESA

Siswadi Sululing¹⁾, Haruni Ode²⁾, Mohammad Gifari Sono³⁾

¹ Universitas Muhammadiyah, Luwuk

Emai: siswadi.sululing@yahoo.com

² Universitas Muhammadiyah, Luwuk

Emai: umyharun@gmail.com

³ Universitas Muhammadiyah, Luwuk

Email: mohgifari@yahoo.co.id

Abstrak

Penelitian ini berjudul analisis laporan keuangan desa, sedangkan tujuan penelitian untuk mengetahui laporan keuangan desa terdiri dari komponen-komponen apa saja. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif. Metode analisis yang digunakan adalah akuntansi keuangan desa, yang dimulai dari transaksi pencatatan transaksi, penggolongan, posting ke buku besar, neraca saldo, ayat jurnal penyesuaian dan laporan keuangan desa. Hasil penelitian adalah setiap transaksi keuangan desa yang terjadi harus dicatat dengan menggunakan buku kas umum, buku kas harian pembantu, buku bank, buku pajak, buku inventaris desa, buku persediaan, buku modal, buku piutang, dan buku hutang dengan benar dan seimbang, sehingga menghasilkan laporan keuangan desa yang terdiri dari dari laporan, laporan realisasi anggaran, laporan kekayaan milik desa awal, neraca desa dan catatan atas laporan keuangan.

Kata kunci: laporan, keuangan, desa, neraca, transaksi

Abstract

The study entitled analysis of the financial statements of the village, while the purpose of the research is to find out the financial report of the village consists of the components of just about anything. Type of this research is quantitative. Methods of analysis used financial accounting is the village, which started from the transaction logging transactions, classifications, post to General Ledger, balance sheet balance, the journal of financial reporting adjustments and the village. Research results is every financial transaction of the village happened to be noted by using public cash book, daily maid, cash book bank book, tax book, book inventory village, books supplies, capital books, books of accounts receivable, and the book debts properly and balanced, to produce financial statements consisting of the villages of realization of the budget report, report, report of the early village of property, balance sheet and notes to financial statements.

Keywords: reports, financial, village, balance sheet, transaction

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014 menyebut bahwa pengelolaan keuangan desa meliputi keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa merupakan rangkaian siklus yang terpadu dan

berintegrasi antara satu tahapan dengan tahapan yang lainnya. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Rangkaian dan asas pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan dan dipenuhi oleh setiap desa agar penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa dapat berjalan sesuai dengan rencana sehingga visi desa dan masyarakat yang sejahtera dapat diwujudkan. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, akan membuat pemerintah desa akan memperoleh dana yang cukup besar dan harus dapat dikelola dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pengelolaan keuangan desa tidak hanya menyangkut perlunya peraturan pendukungnya dan sarana-prasarana, namun yang paling penting adalah sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan komitmen yang dapat diandalkan. Kita sadari bahwa kepala desa dan aparatur desa yang ada saat ini sebagian besar memiliki tingkat pendidikan SMTA, pengetahuan tentang akuntansi dan penatausahaan dalam pengelolaan keuangan desa relatif rendah, sehingga mengalami kesulitan dalam menyusun laporan keuangan desa, dan hal ini tidak bisa dianggap remeh karena bila terjadi kesalahan maka akan menyebabkan laporan keuangan yang telah dibuat menjadi salah. Kondisi seperti ini tentu akan menyulitkan dalam menyusun laporan keuangan desa dan mempertanggung jawabkannya. Permasalahan inilah yang dialami oleh aparatur desa dalam hal ini bendahara desa yang ada di seluruh Indonesia, tidak terkecuali di Kabupaten Banggai. Propinsi Sulawesi Tengah. Perkembangan alokasi dana desa (ADD), APBDesa dan Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintahan Desa (TPAPD) Di Kab. Banggai Tahun 2010 – 2015:

Tabel 1 Perkembangan ADD, APBDESA dan TPAPD Dalam Jutaan Rupiah

Keterangan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
ADD	10.000	11.455	13.599	23.092	23.092	91.072
APBDesa	17.000	19.600	26.700	36.100	37.500	176.27
TPAPD	7.000	8.157	13.599	13.599	14.495	42.048

Sumber: Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banggai, 2015

Sedangkan gambaran APBDesa se-Kabupaten Banggai Tahun 2015 adalah:

Tabel 2 APBDesa Se-Kabupaten Banggai Tahun 2015

Keterangan	Jumlah (Rp)
10% Dana Alokasi Umum + Dana Bagi Hasil	91.072.997.600
Dana Desa dari APBN	77.141.362.000
10% Bagian Pajak Daerah & Retribusi Daerah	8.082.688.684
Total APBDesa Tahun 2015	176.297.048.284

Sumber: Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banggai, 2015

Di Kabupaten Banggai terdapat 291 Desa penerima keuangan desa yang terdapat di APBDesa pada tabel 2 di atas, yang terdiri dari dana desa (DD), alokasi dana desa (ADD), dan Pajak daerah dan retribusi daerah (PDRB), atau bila di rata-ratakan setiap desa akan menerima keuangan desa sebesar Rp. 605.81.781 per desa.

Untuk itu pengelolaan keuangan desa terutama pada tahap penatausahaan keuangan desa, menjadi hal yang penting. Maka diperlukan pemahaman tentang akuntansi dan penatausahaan keuangan dalam pengelolaan keuangan desa kepada sebagian besar kepala desa dan aparatur desa sehingga mereka mampu mempertanggungjawabkannya. Oleh karena itu kehadiran akuntansi keuangan desa sangatlah tepat dan sangat membantu untuk mengatasi masalah tersebut sebagai solusinya. Perlu dirancang sebuah akuntansi keuangan desa yang mudah, sederhana dan jelas serta disertai contoh aplikasi pembahasannya sehingga dengan mudah dapat dipahami dan dilaksanakan oleh aparatur desa dalam hal ini bendahara desa yang harus melakukan penatausahaan keuangan desa yang dimulai dari pencatatan transaksi keuangan desa, jurnal, *posting* ke rekening besar, neraca saldo, ayat jurnal penyesuaian, dan penyusunan laporan keuangan desa yang transparan dan akuntabel.

Akuntansi keuangan desa inilah yang penulis tawarkan sebagai solusi yang tepat agar keluar dari permasalahan yang dihadapi aparatur desa dalam hal ini bendahara desa tersebut di atas, sehingga mampu melakukan penatausahaan dalam pengelolaan keuangan desa dengan melakukan pencatatan transaksi keuangan desa yang benar dan seimbang yang terdiri dari transaksi penerimaan kas, transaksi pengeluaran kas, melakukan penutupan buku setiap akhir bulan serta mampu menyusun laporan keuangan desa yang transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan desa.

Laporan keuangan desa sangat berbeda-beda karena setiap entitas mempunyai aktivitas bisnis yang berbeda-beda pula. Laporan keuangan perusahaan dagang berbeda dengan laporan keuangan pemerintah, demikian juga laporan keuangan yayasan dan seterusnya tanpa terkecuali laporan keuangan desa. Laporan

keuangan keuangan desa harus dibuat secara sederhana dan mudah dipahami serta mudah dilaksanakan.

Urgensi Penelitian

Laporan keuangan desa merupakan hasil akhir dari sebuah proses pencatatan transaksi keuangan yang dilaksanakan oleh aparatur desa dalam hal ini bendahara desa rangka penatausahaan di dalam Pengelolaan keuangan desa. Sebab tanpa melakukan pencatatan transaksi keuangan desa dengan benar dan seimbang tentu tidak akan menghasilkan laporan keuangan desa yang transparan dan akuntabel. Kesalahan melakukan pencatatan transaksi keuangan desa tentu akan mengakibatkan kesalahan yang fatal dalam menyusun laporan keuangan desa. Itulah sebabnya pencatatan transaksi keuangan desa harus dilakukan dengan benar dan seimbang, sehingga dapat membuat laporan keuangan desa yang transparan dan akuntabel.

METODE PENELITIAN

Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada laporan keuangan desa. Desa-desa yang telah menerima dana desa (DD), alokasi dana desa (ADD), dan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) tahun anggaran 2016 di Kabupaten Banggai Propinsi Sulawesi Tengah.

Bahan utama

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi laporan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) Tahun anggaran 2016 untuk desa yang menerima anggaran dana desa (DD), alokasi dana desa (ADD), dan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) di Kabupaten Banggai Propinsi Sulawesi Tengah.

Tempat

Penelitian ini dilakukan pada 39 desa yang telah menerima dana desa (DD), alokasi dana desa (ADD), dan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) tahun anggaran 2016 di Kabupaten Banggai Propinsi Sulawesi Tengah. Desa-desa tersebut sebagai berikut:

Tabel 3 Tempat Penelitian

No.	Nama Desa	Kecamatan
1	Salodik	Luwuk Utara
2	Lenyek	Luwuk Utara
3	Tirta Jaya	Toili
4	Rusa Kencana	Toili
5	Tirtasari	Toili
6	Cendanapura	Toili
7	Mulyasari	Toili
8	Makapa	Toili Barat
9	Gunung Keramat	Toili Barat
10	Mantawa Bone Bae	Toili Barat
11	Kamiwangi	Toili Barat
12	Pasir lamba	Toili Barat
13	Pandan wangi	Toili Barat
14	Simpang II	Simpang Raya
15	Beringin Jaya	Simpang Raya
16	Dwipa Karya	Simpang Raya
17	Koninis	Simpang Raya
18	Mantan A	Simpang Raya
19	Simpang I	Simpang Raya
20	Lokait	Simpang Raya
21	Gonohop	Simpang Raya
22	Sumber Mulya	Simpang Raya
23	Rantau Jaya	Simpang Raya
24	Dowiwi	Simpang Raya
25	Pongian	Bunta
26	Huhak	Bunta
27	Lontio	Bunta
28	Balanga	Bunta
29	Wedakadaka	Lobu
30	Mayayap	Bualemo
31	Bualemo A	Bualemo
32	Bualemo B	Bualemo
33	Longkoga Barat	Bualemo
34	Longkoga Timur	Bualemo
35	Trans Mayayap	Bualemo
36	Lemba Tompotika	Bualemo
37	Nipa Kalemoan	Bualemo
38	Toiba	Bualemo
39	Tikupon	Bualemo

Sumber: Badan Pemerintahan dan pembangunan desa Kab. Banggai, 2016

Ke 39 desa tersebut di atas, terpilih sebagai tempat penelitian karena memenuhi persyaratan pengambilan tempat yaitu: dokumen laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2016 lengkap.

Teknik Pengumpulan Data,

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Dokumentasi, yaitu mengamati dan menganalisis data transaksi keuangan desa tahun 2016 yaitu anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2016
2. Wawancara, yaitu mengajukan tanya jawab dengan aparatur desa dalam hal melakukan pencatatan penerimaan kas dan pengeluaran kas serta penerimaan dan penutupan buku setiap akhir bulan.

Teknik Analisis Data

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif, sedangkan untuk melakukan pembahasan laporan keuangan desa, penulis menggunakan metode analisis **akuntansi keuangan desa**, dengan cara dokumen transaksi keuangan desa diamati dan dianalisis kemudian dilakukan pencatatan transaksi keuangan desa akan mulai dari transaksi keuangan desa (transaksi penerimaan dan pengeluaran kas, penerimaan dan pengeluaran rekening desa di bank rakyat indonesia), dengan menggunakan rekening besarnya masing-masing, *posting*/pemindahbukuan ke rekening besar beserta saldo, neraca saldo, ayat jurnal penyesuaian dan penyusunan laporan keuangan desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian

Dengan menggunakan metode analisis akuntansi keuangan desa, diperoleh hasil penelitian sebagai berikut:

1. Diperlukan buku kas umum, buku kas harian pembantu, buku bank, buku pajak, buku inventaris desa, buku persediaan, buku modal, buku piutang, dan buku hutang untuk mencatat transaksi yang diperlukan untuk membuat laporan keuangan desa.
2. Sedangkan laporan keuangan desa terdiri dari Laporan realisasi anggaran (yang terdiri dari semester 1 dan semester akhir), laporan kekayaan milik desa awal, neraca desa dan catatan atas laporan keuangan desa (CALKDesa)

Pembahasan

1. Buku-buku yang diperlukan untuk menyusun laporan keuangan desa sebagai berikut:

- a. Buku Kas Umum
Buku kas umum digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas, baik secara tunai maupun kredit, digunakan juga untuk mencatat mutasi perbankan atau kesalahan dalam pembukuan. Buku kas umum dapat dikatakan sebagai sumber dokumen transaksi.
- b. Buku Kas Harian Pembantu
Buku kas harian pembantu adalah buku yang digunakan untuk mencatat transaksi pengeluaran dan pemasukan yang berhubungan dengan kas saja.
- c. Buku Bank
Buku bank digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank.
- d. Buku Pajak
Buku pajak digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak.
- e. Buku Inventaris Desa
Buku inventaris digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam mencatat barang-barang yang dimiliki oleh desa.
- f. Buku Persediaan
Buku persediaan adalah buku yang mencatat aliran persediaan bahan-bahan yang habis pakai yang masuk dan digunakan untuk desa yang berasal baik dari pembelian dan pemberian.
- g. Buku Modal
Buku modal/ekuitas dana adalah buku yang digunakan untuk mencatat dana-dana dan hibah yang mengalir ke desa.
- h. Buku Piutang
Buku piutang adalah buku yang digunakan untuk mencatat piutang desa. Piutang adalah harta desa yang timbul karenanya terjadinya transaksi penjualan/sewa menyewa yang pembayarannya dilakukan secara kredit oleh perorangan/badan usaha.
- i. Buku Hutang/Kewajiban
Buku hutang/kewajiban adalah buku yang digunakan untuk mencatat hutang atau kewajiban desa.

j. Neraca

Neraca adalah catatan yang menyajikan posisi keuangan desa dalam satu periode tertentu. Neraca menggambarkan posisi keuangan desa mengenai aktiva, kewajiban, dan modal dana pada satu periode. Pos-pos dalam neraca terbentuk dari transaksi-transaksi yang terjadi di desa.

k. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Desa

Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan SPAP menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Laporan Realisasi Anggaran disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

2. Laporan Keuangan Desa

Laporan keuangan desa yang terdiri dari:

- a. Laporan realisasi anggaran (LRA) Desa adalah laporan realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan, terdiri dari pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan dalam tahun anggaran berkenaan. Dalam laporan LRA terdapat lampiran laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
- b. Laporan kekayaan milik desa awal adalah laporan yang memperlihatkan posisi aset, kewajiban dan, kekayaan bersih desa pada satu periode.
- c. Neraca Desa adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan mengenai posis aset, kewajiban dan ekuitas dana pada satu periode. Aset adalah kekayaan yang dimiliki oleh desa baik aset lancar dan aset tetap, kewajiban adalah berbagai macam hutang yang timbul dari kejadian transaksi masa lalu yang penyelesaiannya menjadi tanggungjawab pemerintah desa, sedangkan ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah desa yang merupakan selisih aset dan kewajiban. Neraca desa menggambarkan status sumber daya yang dimiliki desa, terutama perkembangan sarana dan prasarana produktif yang dimiliki pemerintahan desa untuk mencapai sasaran tahunan desa tersebut.
- d. Catatan atas laporan keuangan (CALK), adalah catatan atas laporan keuangan desa meliputi penjelasan atau daftar rinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam anggaran desa, laporan realisasi anggaran desa, laporan kekayaan milik desa awal dan neraca desa.

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu

ataupun manajemen entitas pelaporan. Oleh karena itu, Laporan Keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman, catatan atas laporan keuangan harus menyajikan informasi yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana perkembangan posisi dan kondisi keuangan/fiskal entitas pelaporan serta bagaimana hal tersebut tercapai sehingga memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan.

Untuk itu, diperlukan pembahasan umum dan referensi ke pos-pos laporan keuangan menjadi penting bagi pembaca laporan keuangan. Selain itu, pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan akuntansi yang diterapkan akan membantu pembaca untuk dapat menghindari kesalahpahaman dalam membaca laporan keuangan.

KESIMPULAN

Setiap transaksi keuangan desa yang terjadi harus dicatat dengan menggunakan buku kas umum, buku kas harian pembantu, buku bank, buku pajak, buku inventaris desa, buku persediaan, buku modal, buku piutang, dan buku hutang dengan benar dan seimbang sehingga menghasilkan laporan keuangan desa yang terdiri dari laporan realisasi anggaran desa, laporan kekayaan milik desa awal, neraca desa dan catatan atas laporan keuangan desa

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof H. Mohamad Nasir, Ph.D., Ak., CA selaku Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi (Ristekdikti) RI yang telah menyediakan dana penelitian dan pengabdian setiap tahunnya. Penelitian ini didanai oleh Kementerian ristekdikti melalui dana hibah penelitian strategi nasional (Stranas) tahun anggaran 2017 dan 2018.
2. Bapak Dr. Farid Haluti, S.Ag., M.Pd, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Luwuk yang telah mendorong dan memberikan bantuan dalam melakukan penelitian ini.
3. Bapak Jurtan Latuba, SE., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Luwuk yang memberikan dukungan dalam melakukan penelitian ini.

4. Ibu Ir. Sri Sukari Agustina, M.Si, selaku Ketua Lembaga Penelitian, Pengembangan dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP3M) Universitas Muhammadiyah Luwuk yang telah menyetujui pengusulan proposal hibah penelitian strategi nasional tahun anggaran 2017 dan 2018.
5. Bapak Dr. Mohammad Gifari Sono, ST., M.M, Bapak Haruni Ode, SE., M.M, sebagai anggota tim peneliti yang \bekerja sama menyelesaikan penelitian ini.

REFERENSI

- Taufik, T. (2007). Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Sistem Keuangan Negara RI. *Jurnal Akuntansi*.
- Hendro Pujo, H, A.S. (2013). Implementasi Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Desa Berdasarkan Perda No. 16 2007 Tentang Keuangan Desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol.1 No,4 hal.1375-1385
- Okta Rosalinda LPD, (2014). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Desa. *Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang*.
- Pujiastuti, T dan Yulianto. 2016, Good governance Pengelolaan keuangan desa menyongsong berlakunya Undang-undang No. 6 tahun 2014. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*. Vol. 1 2016 hal 1-11.
- Hafiz, A. (2011). *Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual*, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Bastian, I. (2010). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar* Edisi Ketiga. Jakarta: Erlangga.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2015, *Standar Akuntansi Keuangan*. Penerbit Salemba Empat Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014, Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71, 2010, Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.
- Riduwan, MBA. (2010). *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*. Penerbit Alfabeta Bandung.
- Sujarweni, V.W. (2015). *Akuntansi Desa: panduan tata kelola keuangan desa*. Penerbit Pustaka Baru Press Yogyakarta.
- Yadiati, W. (2010). *Teori Akuntansi Suatu Pengantar*. Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Yuliansyah dan Rusmianto. (2015). *Akuntansi Desa*. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.